

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A.Z.Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier, Raja Grafindi, Jakarta,2006, hlm.25.

Achmad Ali, Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Group, (Jakarta, 2012),.243

Amiruddin, 2010, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 214.

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 4.

Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika , Jakarta, 2011, halaman 143

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2000, him. 50.

Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 20.

Claudie A. Kermite, Delik Permufakatan Jahat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Loc. Cit., hlm. 35

Edi Setiadi dan Firman Halawa, Korupsi dengan Nilai Kerugian Sedikit, P2U LPPM Unisba, Bandung, 2016

Evi Hartanti, 2012. Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua: Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 9

H. Setiyono, Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 104

H.A.K. Moch.Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1979, hlm. 229.

Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hal. 14.

John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999, Page 3

Kanter, Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm 273.

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.2005

Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kristian, Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 20

M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Mahmud Mulyadi, 2008, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal

Mahrus Ali, Hukum Pidana Korupsi, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 17

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 79.

- Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama, Bogor, Ghalia Indonesia, Hal.11. Ketikkan sesuatu...
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Ketikkan sesuatu... Alumni, 2010), hlm 158.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban pidana korporasi (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 74
- P.A.F.Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Sinar Baru, Bandung, 2006, hlm.90.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 339.
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Diluar KUHP, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 62
- Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 14.
- Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Siregar, F. R., & Sitorus, N. T. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2), 200-206.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1981, hlm. 161.

Syed Hussein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm. 46.

xvii

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 33.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 202.

JURNAL

Chengzhi Yi, 15 April 2015, Dan Hough (ed): *corruption, anti-corruption and governance*, *Crime Law Soc Change*, Springer, Page 285-293.

Elwi Danil & Iwan Kurniawan. April 2017. *Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption*, *Halrev Volume 3 Issue*, Page 67-76.

Khaireya R. Yahya and Salwa S. Gomaa, 2016, Evaluation of Anti-Administrative Corruption Policies in Palestine: Case Study of the Palestinian Ministry of Finance (2004-2013). *The Social Sciences*, 11, Page 595-602.

Soekanto, S. (2017). Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(6), 429-439.

Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005, Page 113.

ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 1959 K/PID.SUS/2021/MA.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sinar Harapan, 1983.

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001